SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 722 /SEK/SK/XI/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR KODE WILAYAH UNTUK PENOMORAN SURAT PADA 85 (DELAPAN PULUH LIMA) PENGADILAN BARU

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa 85 (delapan puluh lima) pengadilan dari tiga lingkungan peradilan telah diresmikan dan mulai beroperasi sejak tanggal 22 Oktober 2018;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan tertib administrasi persuratan 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang Penetapan Daftar Kode Wilayah Untuk Penomoran Surat Pada 85 (Delapan Puluh

Lima) Pengadilan Baru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENETAPAN DAFTAR KODE WILAYAH UNTUK PENOMORAN SURAT PADA 85 (DELAPAN PULUH LIMA) PENGADILAN BARU.

KESATU : Menetapkan daftar kode wilayah dari 85 (delapan puluh lima) pengadilan baru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini untuk digunakan dalam penomoran surat masing-masing pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 November 2018

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

A. S. PUDJOHARSOYO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung RI;
4. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradulan Tata Usaha Negara;
5. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 722/SEK/SK/XI/2018
TANGGAL : 12 November 2018

KODE WILAYAH PENGADILAN BARU

DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

NO	KODE SURAT	WILAYAH HUKUM	SATUAN KERJA
1	W1-U20	PT Banda Aceh	Pengadilan Negeri Blangpidie
2	W1-U21	PT Banda Aceh	Pengadilan Negeri Meureudu
3	W1-U22	PT Banda Aceh	Pengadilan Negeri Suka Makmue
4	W2-U19	PT Medan	Pengadilan Negeri Sei Rampah
5	W2-U20	PT Medan	Pengadilan Negeri Sibuhuan
6	W3-U16	PT Padang	Pengadilan Negeri Pulau Punjung
7	W4-U15	PT Pekanbaru	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan
8	W6-U10	PT Palembang	Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
9	W8-U9	PT Bengkulu	Pengadilan Negeri Mukomuko
10	W9-U11	PT Tanjung Karang	Pengadilan Negeri Gedong Tataan
11	W7-U4	PT Bangka Belitung	Pengadilan Negeri Koba
12	W7-U5	PT Bangka Belitung	Pengadilan Negeri Mentok
13	W11-U22	PT Bandung	Pengadilan Negeri Banjar
14	W11-U23	PT Bandung	Pengadilan Negeri Cikarang
15	W16-U9	PT Palangkaraya	Pengadilan Negeri Kuala Kurun

NO	KODE SURAT	WILAYAH HUKUM	SATUAN KERJA
16	W16-U10	PT Palangkaraya	Pengadilan Negeri Nanga Bulik
17	W16-U11	PT Palangkaraya	Pengadilan Negeri Pulang Pisau
18	W15-U13	PT Banjarmasin	Pengadilan Negeri Paringin
19	W18-U13	PT Samarinda	Pengadilan Negeri Penajam
20	W19-U8	PT Manado	Pengadilan Negeri Melonguane
21	W23-U8	PT Kendari	Pengadilan Negeri Lasusua
22	W23-U9	PT Kendari	Pengadilan Negeri Wangi Wangi
23	W22-U27	PT Makassar	Pengadilan Negeri Belopa
24	W27-U5	PT Maluku	Pengadilan Negeri Dobo
25	W27-U6	PT Maluku	Pengadilan Negeri Namlea
26	W27-U7	PT Maluku	Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu
27	W27-U8	PT Maluku	Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa
28	W28-U5	PT Maluku Utara	Pengadilan Negeri Sanana
29	W28-U6	PT Maluku Utara	Pengadilan Negeri Bobong
30	W30-U11	PT Jayapura	Pengadilan Negeri Kaimana

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

A. S. PUDJOHARSOYO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 722 /SEK/SK/XI/2018
TANGGAL : 12 November 2018

KODE WILAYAH PENGADILAN BARU
DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

NO	KODE SURAT	WILAYAH HUKUM	SATUAN KERJA
1	W1-A21	Mahkamah Syar'iyah Aceh	Mahkamah Syar'iyah Blangpidie
2	W1-A22	Mahkamah Syar'iyah Aceh	Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue
3	W1-A23	Mahkamah Syar'iyah Aceh	Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam
4	W2-A21	PTA Medan	Pengadilan Agama Sei Rampah
5	W2-A22	PTA Medan	Pengadilan Agama Sibuhuan
6	W3-A18	PTA Padang	Pengadilan Agama Pulau Punjung
7	W4-A17	PTA Pekanbaru	Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura
8	W4-A18	PTA Pekanbaru	Pengadilan Agama Teluk Kuantan
9	W7-A6	PTA Bengkulu	Pengadilan Agama Mukomuko
10	W7-A7	PTA Bengkulu	Pengadilan Agama Bintuhan
11	W7-A8	PTA Bengkulu	Pengadilan Agama Tais
12	W7-A9	PTA Bengkulu	Pengadilan Agama Kepahiang
13	W6-A8	PTA Palembang	Pengadilan Agama Pangkalan Balai

NO	KODE SURAT	WILAYAH HUKUM	SATUAN KERJA
14	W6-A9	PTA Palembang	Pengadilan Agama Martapura
15	W6-A10	PTA Palembang	Pengadilan Agama Muaradua
16	W6-A11	PTA Palembang	Pengadilan Agama Pagar Alam
17	W6-A12	PTA Palembang	Pengadilan Agama Prabumulih
18	W8-A10	PTA Bandar Lampung	Pengadilan Agama Gedong Tataan
19	W8-A11	PTA Bandar Lampung	Pengadilan Agama Pringsewu
20	W8-A12	PTA Bandar Lampung	Pengadilan Agama Mesuji
21	W8-A13	PTA Bandar Lampung	Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah
22	W8-A14	PTA Bandar Lampung	Pengadilan Agama Sukadana
23	W10-A25	PTA Bandung	Pengadilan Agama Soreang
24	W10-A26	PTA Bandung	Pengadilan Agama Ngamprah
25	W14-A9	PTA Pontianak	Pengadilan Agama Singkawang
26	W14-A10	PTA Pontianak	Pengadilan Agama Nanga Pinoh
27	W14-A11	PTA Pontianak	Pengadilan Agama Sungai Raya
28	W16-A7	PTA Palangkaraya	Pengadilan Agama Nanga Bulik
29	W16-A8	PTA Palangkaraya	Pengadilan Agama Sukamara
30	W16-A9	PTA Palangkaraya	Pengadilan Agama Kuala Pembuang
31	W16-A10	PTA Palangkaraya	Pengadilan Agama Kasongan

NO	KODE SURAT	WILAYAH HUKUM	SATUAN KERJA
32	W16-A11	PTA Palangkaraya	Pengadilan Agama Tamiyang Layang
33	W16-A12	PTA Palangkaraya	Pengadilan Agama Pulang Pisau
34	W16-A13	PTA Palangkaraya	Pengadilan Agama Kuala Kurun
35	W17-A11	PTA Samarinda	Pengadilan Agama Penajam
36	W17-A12	PTA Samarinda	Pengadilan Agama Sendawar
37	W20-A25	PTA Makassar	Pengadilan Agama Belopa
38	W20-A26	PTA Makassar	Pengadilan Agama Pasangkayu
39	W20-A27	PTA Makassar	Pengadilan Agama Malili
40	W19-A10	PTA Palu	Pengadilan Agama Ampana
41	W21-A8	PTA Kendari	Pengadilan Agama Wangi Wangi
42	W21-A9	PTA Kendari	Pengadilan Agama Lasusua
43	W21-A10	PTA Kendari	Pengadilan Agama Rumbia
44	W18-A7	PTA Manado	Pengadilan Agama Lolak
45	W18-A8	PTA Manado	Pengadilan Agama Bolaang Uki
46	W18-A9	PTA Manado	Pengadilan Agama Boroko
47	W18-A10	PTA Manado	Pengadilan Agama Tutuyan
48	W26-A5	PTA Gorontalo	Pengadilan Agama Suwawa
49	W26-A6	PTA Gorontalo	Pengadilan Agama Kwandang
50	W24-A4	PTA Ambon	Pengadilan Agama Dataran Hunipopu
51	W24-A5	PTA Ambon	Pengadilan Agama Dataran Hunimoa

NO	KODE SURAT	WILAYAH HUKUM	SATUAN KERJA
52	W24-A6	PTA Ambon	Pengadilan Agama Namlea
53	W25-A14	PTA Jayapura	Pengadilan Agama Kaimana

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

A. S. PUDJOHARSOYO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 722/SEK/SK/XI/2018
TANGGAL : 12 November 2018

KODE WILAYAH PENGADILAN BARU
DI LINGKUNGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

NO	KODE SURAT	WILAYAH HUKUM	SATUAN KERJA
1	W1-TUN10	PTTUN Medan	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang
2	W4-TUN7	PTTUN Makassar	Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

A. S. PUDJOHARSOYO